

**DAMPAK PEMEKARAN NAGARI DALAM MENINGKATKAN  
PELAYANAN PUBLIK KEPADA MASYARAKAT NAGARI  
UJUNG GADING KECAMATAN LEMBAH MELINTANG  
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**BENI MULIA  
NPM: 14.852.0052**



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
2018**

**DAMPAK PEMEKARAN NAGARI DALAM MENINGKATKAN  
PELAYANAN PUBLIK KEPADA MASYARAKAT NAGARI  
UJUNG GADING KECAMATAN LEMBAH MELINTANG  
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**BENI MULIA  
NPM: 14.852.0052**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Program  
Strata 1 (S1) pada Program Studi Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Medan Area

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
2018**

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Dampak Pemekaran Nagari Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat

Nama : Beni Mulia

NPM : 148520052

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui  
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

**Drs. H. Syafruddin Ritonga, MAP**

**Drs. H. Irwan Nasution, S.Pd, MAP**

Dekan

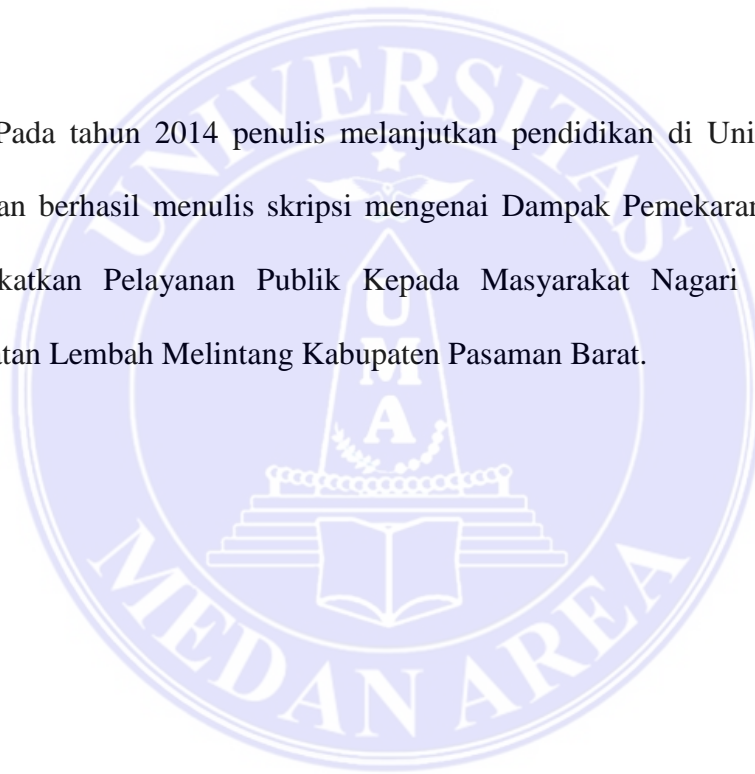
**Prof. Dr. H. M. Arif Nasution, MA**

**Tanggal Lulus :**

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis dilahirkan di Ujung Gading, pada tanggal 20 April 1995, putra pertama dari 2 bersaudara, merupakan putra dari ayahanda Mursal dan Ibunda Elwina. Penulis menempuh pendidikan sekolah dasar di SDN 32 Lombok Kecamatan Lembah melintang, dan pada tahun 2007 penulis melanjutkan sekolah di SMPN 1 Lembah Melintang berakhir tahun 2010, pada tahun 2010 penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Lembah Melintang dan tamat pada tahun 2013.

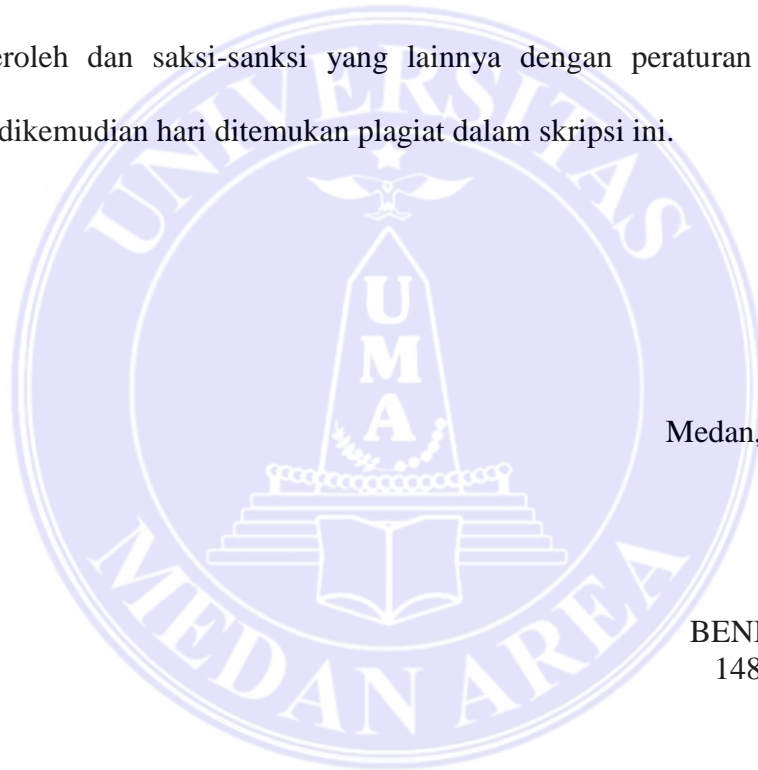
Pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Medan Area, dan berhasil menulis skripsi mengenai Dampak Pemekaran Nagari dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat.



## **LEMBAR PERNYATAAN**

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya tulis orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh dan saksi-saksi yang lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan plagiat dalam skripsi ini.



Medan, Mei 2018

BENI MULIA  
148520052

## ABSTRAK

Jumlah penduduk mencapai 47.642 Jiwa tidak efektif jika hanya dilayani satu Nagari/Desa, maka pemekaran dipercaya salah satu solusi yang dapat menangani masalah pelayanan yang tidak maksimal. Disamping pemekaran, pelayanan yang prima juga harus diterapkan, pelayanan yang prima tersebut dapat dinilai dari indikator sebagai berikut: kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efisien, ekonomis, keadilan yang merata, ketepatan waktu. Dari uraian diatas penulis mengadakan penelitian mengenai Dampak Pemekaran Nagari Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat. Rumusan masalah penelitian yang menjadi acuan penulis adalah Bagaimana Dampak Pemekaran Nagari Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan kepustakaan dan penelitian lapangan seperti wawancara, observasi, dokumentasi. Analisis data dengan metode siklus dari Miles dan Hubermann yakni reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Informan penelitian adalah Wali Nagari Ujung Gading, Kepala Bidang Pemerintahan Nagari Ujung Gading, Masyarakat Nagari Ujung Gading. Hasil penelitian yang diperoleh adalah pemekaran tidak berdampak kepada pelayanan, karena pelayanan sudah sesuai dengan indikator pelayanan prima.

**Kata Kunci : Dampak, Pemekaran, Pelayanan Publik.**

## ABSTRACT

*The population of 47.642 people is not effective if only served a village, then division trusted one of the solutions that can handle the problem of service that is not maximized. In addition to the division, excellent service can be assessed from the following indicators: simplicity, clarity and certainty, security, openness, efficient, economical, equitable justice, timeliness. From the above description the authors conducted research on the Impact Of Division Villages On Improving Publik Servie To The Comunity Ujung Gading Village Lembah Melintang Sub-district Office West Pasaman Regency. The formulation of research that became the author's reference is how the Impact Of Division Villages On Improving Publik Servie To The Comunity Ujung Gading Village Lembah Melintang Sub-district Office West Pasaman District. This research is a qualitative research with data collection tehniques using literature and field researh such as interviews, observation, doumentation. Analysis of data with the cycle method of Miles and Hubermann data reduction, data presentation, conclusion drawing. Informant research is Wali Ujung Gading Village, head of goverment Ujung Gading Village, society around Ujung Gading Village. The result of the research is that division has no impact to the service, because the service is in accordance with the excellent service indicator.*

**Keywords:** *Impact, Division, Publik Service*

## KATA PENGANTAR

Assalamu A'alaikum....

Bismillahirrohmanirrohim,

Kesempatan pertama segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala Karunia-NYA dan sholawat beserta salam kepada Nabi Muhammad SAW sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan, dengan judul Dampak Pemekaran Nagari Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari banyak kesulitan dan keterbatasan kemampuan penulis. Namun dengan tekat kemauan yang kuat penulis dan bantuan dari berbagai pihak untuk selesainya skripsi ini. Maka untuk itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada pihak-pihak tersebut. Terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Arif Nasution, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
2. Ibu Dra. Hj. Rosmala Dewi, M.Pd selaku ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara .
3. Bapak Drs. H. Syafruddin Ritonga, MAP selaku dosen pembimbing I penulis.
4. Bapak Drs. H. Irwan Nasution, S.Pd, MAP selaku dosen pembimbing II penulis.
5. Seluruh bapak dan ibu dosen serta staf Administrasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.



6. Terima kasih dan penghargaan penulis sampaikan kepada Ayahanda tercinta Mursal dan Ibunda tercinta Elwina atas segala pengorbanan, dukungan dan do'a selama ini, bagi keduanya bakti penulis.
7. Seluruh keluarga tercinta penulis, terutama Adik tercinta Ahmad Haqqi
8. Kepada seluruh sahabat se-almamater dan sahabat dari Pasaman Barat, Mandailing Natal, Padang Lawas, Labuhan Batu Selatan dan Sahabat dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

Penulis sangat menghargai setiap masukan dan kritikan untuk perbaikan dan penyempurnaan Skripsi ini, kritikan yang membangun merupakan penambahan wawasan berpikir penulis untuk meneruskan khasanah pemikiran dalam tulisan selanjutnya. Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat.

Medan, Mei 2018  
Penulis,

Beni Mulia

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR BAGAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	3
1.3 Pembatasan Masalah .....	4
1.4 Tujuan Penelitian .....	4
1.5 Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>6</b>
2.1 Pemekaran .....	6
2.1.1. Pengertian Pemekaran.....	6
2.1.2. Syarat-syarat Pemekaran.....	7
2.1.3. Tujuan Pemekaran.....	7
2.1.4. Faktor Pendukung Pemekaran Wilayah.....	7
2.1.5. Konflik Pemekaran Wilayah.....	9
2.2 Nagari .....	10
2.2.1. Pengertian Nagari.....	10
2.2.2. Pandangan Mengenai UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Kaitannya dengan Nagari.....	11

2.3. Pelayanan Publik .....	12
2.3.1. Pengertian Pelayanan Publik.....	12
2.3.2. Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik.....	12
2.3.3. Pola-Pola Pelayanan.....	15
2.3.4. Sistem Pelayanan Publik.....	16
2.3.5. Standar Pelayanan Publik.....	16
2.3.6. Strategi Mengembangkan Pelayanan Prima dalam Pelayanan Publik .....	17
2.3.7. Kualitas Pelayanan Publik.....	18
2.3.8. Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.....	19
2.3.9. Lemahnya Pelayanan Publik .....	20
2.3.10. Perbedaan Karakteristik Antara Penyedia Pelayanan Publik Oleh Pemerintah dan Swasta.....	21
2.4 Kerangka Pemikiran.....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>25</b>
3.1 Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian .....	25
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	26
3.3 Informan Penelitian .....	26
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	26
3.5 Teknik Analisis Data .....	28
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	30
4.1.1 Deskripsi Nagari Ujung Gading .....	30
4.1.2 Pemekaran Nagari Ujung Gading.....	51
4.2 Pembahasan .....	53
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>62</b>

5.1 Kesimpulan.....	62
5.2 Saran.....	62

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Luas wilayah (KM <sup>2</sup> ) menurut Jorong di Nagari Ujung Gading .....	31
2. Batas Wilayah Nagari Ujung Gading .....	32
3. Orbitasi dan waktu tempuh.....	32
4. Jumlah Penduduk Dirinci Menurut Domisili Dikejorongan.....	33
5. Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin 2017.....	34
6. Jumlah Penduduk Menurut Agama.....	35
7. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian.....	36
8. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....	36
9. Sarana dan Prasarana Nagari.....	38
10. Standar Operasional Pelayanan Nagari Ujung Gading.....	50

## DAFTAR BAGAN

### Halaman

1. Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Nagari Ujung Gading..... 41



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Nagari adalah pembagian wilayah administrasi di bawah kecamatan yang biasanya terdapat di provinsi Sumatera Barat, menurut pemerintahan Indonesia Nagari sama dengan Desa, yang dimana tertera dalam peraturan pemerintah (PP) No 72 tahun 2005 tentang desa, yang menekankan prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan keanekaragaman daerah, bahwa istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat. Dalam konteks otonomi daerah Nagari merupakan perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh Wali Nagari.

Seiring dengan dinamika dan permasalahan yang muncul dan berkembang di masyarakat dengan begitu cepat menuntut pemerintah sebagai pelayan masyarakat untuk lebih berbenah diri. Sejak Presiden Republik Indonesia menetapkan kabupaten 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) pada tahun 2015, yang salah satunya adalah kabupaten Pasaman Barat, maka dari itu Bupati menganalisis salah satu faktor penyebabnya adalah yang dimana diantara 11 Kecamatan yang ada di Pasaman Barat masih ada 5 Kecamatan yang memiliki satu Nagari/Desa dalam satu Kecamatan, maka dari itu Bupati Pasaman Barat mewajibkan adanya pemekaran Nagari/Desa disetiap Kecamatan di Pasaman Barat salah satunya Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang. Selain dari itu, di adakannya pemekaran Nagari/Desa agar pelayanan terhadap masyarakat dapat dilakukan dengan maksimal, karena jumlah penduduk Nagari Ujung Gading berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Pasaman Barat pada tahun

2017 adalah 47.642 jiwa yang terdiri 23.864 jiwa laki-laki sedangkan perempuan 23.778 jiwa, dengan luas wilayah 263,77 km<sup>2</sup>. Dengan melihat jumlah penduduk tidak pantas hanya dilayani oleh satu Nagari/Desa dan berdasarkan undang-undang (UU) No 6 tahun 2014, maka sudah sepantasnyalah untuk melakukan pemekaran, karena sasaran yang hendak dicapai dengan adanya pemekaran tersebut apakah berdampak baik atau sebaliknya bagi efektivitas pelayanan terhadap masyarakat, dan apakah bisa meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik atau malah sebaliknya dan apakah dapat mempercepat pembangunan di tingkat Nagari/Desa atau malah menimbulkan masalah-masalah yang baru karena mengingat besarnya dana desa yang di berikan pemerintah setiap tahunnya.

Dengan melihat masalah diatas, menggerakkan pemerintah Kabupaten Pasaman Barat untuk berbenah diri agar meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan melaksanakan pemekaran Nagari/Desa disetiap Kecamatan terutama di Kecamatan yang hanya mempunyai satu Nagari/Desa. Nagari/Desa merupakan struktur pemerintahan paling bawah, sejak presiden membuat program nawacita pada butir ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka kesatuan nasional, selain itu pemerintah juga memberikan anggaran kepada desa setiap tahunnya, maka perangkat desa mempunyai tanggung jawab yang sangat besar, dengan melihat jumlah penduduk di Nagari Ujung Gading yang sangat padat maka membutuhkan sumber daya aparatur yang proporsionalitas, mekanisme kerja yang efektif, keuangan yang mencukupi, dan didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, akan dapat menghasilkan kinerja yang efektif terhadap pelayanan



kepada masyarakat, transparan juga akan membuat masyarakat puas terhadap pelayanan.

Dari pemekaran tersebut dapat diperhitungkan bagaimana dampak pemekaran yang dirasakan oleh masyarakat dalam pelayanan kepada masyarakat dan menghilangkan semua keluhan kesah yang dirasakan masyarakat selama ini seperti antri yang begitu lama dalam kepengurusan, ketidakpedulian terhadap masyarakat karena banyaknya pekerjaan di kantor, ketidaktepatan waktu dalam penyelesaian, masih banyaknya pilih kasih dalam melakukan pelayanan, persyaratan yang begitu rumit, maka hal ini lah yang menunjukkan bahwa kinerja aparatur yang belum maksimal, dan belum mampu mewujudkan nilai-nilai akuntabilitas, responsivitas, efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat.

Karena hal-hal di ataslah, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dan menjadikan judul skripsi mengenai “Dampak Pemekaran Nagari dalam meningkatkan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat” dengan mengambil studi kasus di kantor Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dilakukan agar pelaksanaan penelitian dapat terarah dan terfokus. Menurut Winarno Surakhmad (2000:34), masalah adalah setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk menyelesaikannya. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi pokok permasalahan yang penulis rumuskan dalam penelitian ini adalah “bagaimana dampak pemekaran nagari dalam meningkatkan pelayanan

publik kepada masyarakat di Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat”.

### **1.3. Pembatasan Masalah**

Menurut Jamaluddin Ahmad (2015:66) masalah adalah suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang menimbulkan tanda tanya dan dengan sendirinya memerlukan upaya untuk mencari sesuatu jawaban. Untuk membatasi ruang lingkup penelitian ini agar pembahasannya lebih fokus kepada rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka pembatasan masalahnya sebagai berikut:

1. Penelitian ini dibatasi perihal dampak pemekaran dalam meningkatkan pelayanan publik.
2. Lokasi penelitian dalam menyelesaikan dan menjawab masalah-masalah diatas adalah kantor Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat.
3. Periode penelitian dibatasi pada 2018.

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Menurut Jujun Sumatri (2002:313), tujuan penelitian adalah sebagai pernyataan mengenai ruang lingkup kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan masalah yang akan dirumuskan. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor yang melatar belakangi penyebab pemekaran Nagari Ujung Gading.

2. Untuk mengetahui dampak dari pemekaran dalam meningkatkan pelayanan publik di Nagari Ujung Gading.

### **1.5. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

#### 1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk memperkaya pandangan ilmiah, meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berfikir yang terkhususnya dalam Ilmu Administrasi Negara dan dapat menganalisa permasalahan tentang pemekaran dan pelayanan publik.
- b. Sebagai bahan informasi bagi calon peneliti yang akan melakukan penelitian yang sama.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah, diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau masukan untuk menetapkan kebijakan pemekaran Nagari dengan sasaran utamanya kepada pelayanan yang prima terhadap masyarakat agar dapat meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
- b. Bagi penulis, bermanfaat untuk memperkaya pandangan ilmiah, meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berfikir yang terkhususnya dalam menganalisa permasalahan tentang pemekaran.
- c. Bagi masyarakat diharapkan agar lebih peduli terhadap apa saja kebijakan pelayanan yang di terapkan pemerintah dan ikut berpartisipasi untuk meningkatkan keefektivitasan pelayanan publik, supaya masyarakat dapat menikmati pelayanan manajemen servis dari pemerintah sebagai pelaksana pelayanan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Pemekaran**

##### **2.1.1. Pengertian Pemekaran**

Desentralisasi dan otonomi daerah merupakan bentuk sistem penyerahan urusan pemerintahan dan pelimpahan wewenang kepala daerah yang berada dibawahnya. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pheni Chalid 2005:15). Sedangkan pemekaran daerah adalah memisahkan suatu bagian wilayah yang merupakan satu kesatuan yang utuh menjadi beberapa bagian yang berdiri sendiri (Poerwadarminta:2005).

Berdasarkan asas desentralisasi dan otonomi daerah dapat di ambil kesimpulan dari pengertian diatas pemekaran daerah adalah proses pembagian wilayah otonom menjadi dua atau lebih wilayah otonom yang baru untuk mencapai tujuan kesejahteraan wilayah otonom yang baru.

##### **2.1.2. Syarat-Syarat Pemekaran**

Syarat-syarat pemekaran desa menurut undang-undang RI Nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

- a. Batas usia desa induk paling sedikit 5 tahun terhitung sejak pembentukan.
- b. Jumlah penduduk sesuai dengan jumlah penduduk yang ditetapkan dalam pasal 8 undang-undang desa.
- c. Wilayah kerja memiliki akses transportasi antarwilayah.

- d. Sosial budaya yang menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa.
- e. Memiliki potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung.
- f. Batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.
- g. Sarana dan prasarana bagi pemerintah desa dan pelayanan publik.
- h. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **2.1.3. Tujuan Pemekaran**

Sedangkan tujuan penataan desa menurut undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

- a. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
- c. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik.
- d. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa.
- e. Meningkatkan daya saing desa.

### **2.1.4. Faktor Pendukung Pemekaran Wilayah**

Selain syarat yang dijelaskan diatas dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, ada beberapa yang harus diperhatikan dalam melaksanakan pemekaran wilayah yang mengacu kepada PP. No. 78 tahun 2007 tentang

persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah. Antara lain:

1. Kemampuan Ekonomi

Kemampuan ekonomi disini adalah cerminan hasil kegiatan usaha perekonomian yang berlangsung disuatu daerah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan yang dapat diukur produk domestik regional bruto (PDRB) dan penerimaan daerah itu sendiri.

2. Potensi Daerah

Cerminan tersedianya sumber daya dapat dimanfaatkan dan memberi sumbangan terhadap penerimaan daerah dan kesejahteraan masyarakat yang dapat diukur dari:

- a. Sarana ekonomi
  - b. Sarana pendidikan
  - c. Sarana kesehatan
  - d. Sarana transportasi
  - e. Sarana pariwisata
3. Sosial budaya

Sosial budaya disini cerminan yang berkaitan dengan struktur sosial dan pola budaya masyarakat, kondisi sosial budaya masyarakat yang dapat diukur dari tempat peribadatan dan sarana olahraga.

4. Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah

Jumlah penduduk yang harus sesuai dengan peraturan yang ada dan luas wilayah yang harus sesuai dengan peraturan yang ada.



### **2.1.5. Konflik Pemekaran Wilayah**

Salah satu kecenderungan yang terjadi selama pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya pemekaran wilayah di beberapa daerah. Akan muncul aktor yang sengaja memanfaatkan konflik untuk kepentingan politiknya. Adapun konflik yang terjadi ialah (Pheni Chalid 2005:131-137)

#### **1.Rekayasa Politik**

Logika kekuasaan selalu menghendaki adanya ketergantungan atas pihak yang dikuasai. Maka pemekaran wilayah sudah barang tentu merupakan kerugian politik bagi wilayah induk. Tidak mengherankan akan ada rekayasa politik yang bertujuan menghambat proses pemekaran, meski hal itu mungkin tidak akan diakui dan sulit untuk dibuktikan. Pemekaran wilayah, adakalanya lebih mencerminkan kepentingan politik pusat dari pada kepentingan rakyat di daerah.

#### **2.Batas Wilayah**

Pembentukan wilayah baru secara otomatis menyebabkan perubahan tata ruang batas wilayah. Persoalan penentuan luas dan tapal batas daerah serta keberatan dari daerah induk untuk menyerahkan beberapa wilayah yang ada kepada daerah baru merupakan persoalan pelik yang dapat berpotensi memicu konflik antar daerah.

Menurut Syafruddin (2010: 50-55) faktor penyebab langsung maupun tidak langsung munculnya persoalan pasca pembentukan daerah baru dapat diidentifikasi dalam tiga aspek, antara lain :

Pertama, manipulasi data awal dan proses pembentukan. Apabila pemekaran sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan, maka permasalahan akan dapat dihindari jika telah terjadi pemekaran.

Kedua, nafsu politik elit lokal dan nasional memberangus kesadaran kolektif. Banyak daerah yang tidak layak dimekarkan karna tidak sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan tetapi banyak yang terjadi pemekaran walaupun tidak sesuai dengan persyaratan dikarenakan nafsu elit lokal dan nasional yang dengan motif ekonomi dan didukung oleh DPR dan DPD sebagai penyambung aspirasi rakyat. Sehingga mengakibatkan kesadaran kolektif hilang, tenggelam oleh ketamakan politik dan massa yang ikut-ikutan terbuai bayang-bayangan kenikmatan pemekaran daerah.

Ketiga, kemandirian fiskal yang dijamin UU bagi daerah-daerah pemekaran seperti dana alokasi umum (DAU), bagi-bagi hasil sumber daya alam (SDA), pendapatan asli daerah (PAD).

Selain dari itu, terjadinya pemekaran dari faktor fiskal ini terlebih-lebih adanya bantuan ke desa-desa 1,2 miliar setiap tahunnya.

Menurut Saefulhakim (2004), pemekaran wilayah dilandaskan pada landasan logika pembangunan agar mampu:

1. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan kewenangan lebih kepada masyarakat lokal untuk mengelola potensi sumberdaya wilayah secara arif dan bijaksana.
2. Partisipasi dan rasa memiliki masyarakat meningkat.
3. Efisiensi, produktifitas serta pemeliharaan kelestariannya.
4. Akumulasi nilai tambah secara lokal dan kesejahteraan meningkat.
5. Prinsip keadilan dalam kesejahteraan yang berkeadilan lebih tercipta, sehingga ketahanan nasional semakin kuat.

## **2.2. Nagari**

### **2.2.1. Pengertian Nagari**

Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam daerah provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari himpunan beberapa suku yang mempunyai wilayah tertentu batas-batasnya, mempunyai harta kekayaan sendiri, berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam memilih pimpinan pemerintahannya. Sedangkan menurut ahli yang dimana Soeroto mengemukakan bahwasanya Nagari adalah kesatuan keluarga yang lebih besar dari suku, Nagari juga biasanya terdiri dari lebih kurang 4 suku yaitu keluarga bear setali darah dari beberapa paruik menurut garis keturunan ibu, (Soeroto,2005:20).



### **2.2.2. Pandangan Mengenai UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa dan kaitannya dengan Nagari**

Nagari menurut pemerintahan Indonesia sama dengan desa seperti yang tertuang di UU No.6 tahun 2014, dengan demikian berikut berupa pandangan UU tentang desa yang berkaitan dengan Nagari di Sumatera Barat:

1. Bahwa dalam UU no.6 tahun 2014 tentang desa terdapat 2 (dua) jenis desa, yaitu desa dan desa adat, sesuai pasal 6.
2. Desa dan desa adat mempunyai karakteristik yang berbeda satu sama lainnya.
3. Dalam menentukan penyelenggaraan pemerintahan terdepan ditetapkan desa adat, maka pemerintah provinsi (Sumatera Barat) atau kabupaten/kota diminta memilih antara desa atau desa adat, sesuai penjelasan pasal 6 UU no.6 tahun 2014 tentang desa.
4. Kalau pilihan penyelenggaraan pemerintahan terdepan ditetapkan desa adat, maka pemerintah provinsi di haruskan membuat peraturan daerah (perda), sesuai pasal 109 UU no.6 tahun 2014 tentang desa.
5. Nagari merupakan satu kesatuan masyarakat hukum adat, bersifat geneologis matrilineal dan historis dengan filsafat adat salingka nagari.
6. Maka, Nagari dikategorikan sebagai desa adat, dan ini adalah suatu keistimewaan yang sudah di akui oleh kostitusi NKRI.

Dalam membuat peraturan daerah (perda) tentang nagari (bukan perda tentang pemerintahan Nagari) perlu memperhatikan Bab XIII, ketentuan khusus desa adat dengan pasal-pasalnya disamping pasal lainnya dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 ini sesuai panduan pasal 111.

## **2.3. Pelayanan Publik**

### **2.3.1. Pengertian Pelayanan Publik**

Menurut Eko Suprianto (2001:9), pelayanan adalah upaya untuk membantu menyiapkan, atau mengurus keperluan orang lain. Adapun yang dimaksud Pelayanan publik menurut Kepmenpan No.63/KEP/M.PAN/7/2003 adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksana ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Kurniawan (2005:4), pelayanan publik adalah pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditetapkan.

Dengan demikian, dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwasanya pelayanan publik ialah pemenuhan kebutuhan dan keinginan masyarakat terhadap layanan dari penyelenggara pelayanan sesuai dengan peraturan yang ada. Pada dasarnya negara sebagai penyelenggara pelayan publik harus memenuhi kebutuhan masyarakat yang dimana Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai aparatur yang abdi negara dan abdi masyarakat.

### **2.3.2. Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik**

Demi tercapainya pelayanan publik yang prima maka sangat di butuhkan prinsip-prinsip pelayanan publik sebagai panduan dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat. Maka prinsip-prinsip tersebut dapat dipahami dengan penjelasan sebagai berikut menurut Istianto (Abdul Kadir,2015:116-125) :

## A. Kesederhanaan

Kesederhanaan hakekatnya lebih menekankan pada aspek prosedur kerja penyelenggara pelayanan, termasuk persyaratan dan pelaksana teknis operasional. Prosedur kerja yang dimaksudkan ialah tata urutan pelaksanaan kerja atau tindakan yang dilakukan dalam penyelenggaraan pelayanan.

Hal yang sangat relevan yang perlu diperhatikan dalam mendukung prinsip kesederhanaan pelayanan ialah ;

1. Mekanisme kerja atau tata urutan pelayanan, artinya jumlah meja/biro yang dilewati dalam prosedur pelayanan harus sederhana. Apabila membutuhkan jumlah meja/biro yang harus dilewati banyak, maka alangkah lebih baiknya untuk mempertimbangkannya dan yang benar-benar mempunyai kepentingan yang urgen yang di ikut sertakan dalam mekanisme kerja.
2. Spesifikasi persyaratan pelayanan, artinya dalam menyusun prosedur pelayanan perlu memperhatikan bagaimana kerumitan mengurus persyaratan yang diperlukan, sedapat mungkin dalam mengurus persyaratan yang diperlukan tidak terlalu banyak melibatkan instansi kerja lain, yang berakibat menambah mata rantai birokrasi.
3. Tertip dalam sistem penataan dan penyimpanan dokumen/arsip, dengan sistem penyimpanan dokumen/arsip yang baik, rapi, sistematis, aman, dapat memudahkan dan mempercepat dalam penemuan kembali berkas, sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama dalam proses penyelenggaraan pelayanan.
4. Kapasitas loket dan petugas yang cukup, artinya dalam proses pelayanan perlu memperhatikan jumlah loket yang memadai dengan beban/volume permintaan pelayanan. Dengan loket dan petugas yang cukup maka pelayanan akan cepat dan waktu tunggu masyarakat tidak terlalu lama.
5. Koordinasi antara unit kerja yang terkait dalam pelayanan, dalam penyelenggara pelayanan perlu koordinasi dan kerja sama dengan unit kerja yang terkait, sehingga menunjang kelancaran mengurus persyaratan maupun proses penyelesaian pelayanan.

## B. Kejelasan dan Kepastian

Prinsip ini mengandung arti adanya kejelasan dan kepastian mengenai:

1. Prosedur tata cara pelayanan.
2. Persyaratan pelayanan, baik persyaratan teknis maupun persyaratan administratif.
3. Unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan.
4. Rincian biaya/tarif pelayanan dan tata cara pembayaran.
5. Jadwal waktu penyelesaian pelayanan.

### C. Keamanan

Keamanan disini mengandung arti bahwa proses serta hasil pelayanan dapat memberikan keamanan, kenyamanan, dan dapat memberikan kepastian hukum. Agar terciptanya proses pelaksanaan pelayanan yang bermutu memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Keamanan, dalam arti baik proses pelaksanaan pelayanan maupun mutu produk pelayanan umum dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. Sehingga menumbuhkan rasa kepercayaan dari masyarakat.
2. Nyaman, dalam arti bahwa kondisi dan mutu dalam proses pelaksanaan hendaknya diciptakan kondisi tempat/ruangan pelayanan dapat memberikan rasa nyaman, terpenuhi secara lancar bagi kepentingan urusan pelayanan, serta mutu produk pelayanan yang diberikan pada masyarakat dapat memenuhi ukuran yang standart, sehingga dapat memenuhi rasa nyaman terhadap masyarakat.
3. Tertib, bahwa dalam proses penyelenggaraan pelayanan hendaknya dapat diciptakan pelaksanaan yang rapi, berjalan sesuai prosedur, urutan pemberian pelayanannya rutin sesuai alur tahapan penyesuaian pekerjaan.

### D. Keterbukaan

Prinsip ini mengandung arti bahwa prosedur persyaratan, satuan kerja/pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian, rincian biaya, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta, sehingga tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan dapat tercapai secara maksimal. Hal-hal yang perlu diupayakan dalam prinsip ini ialah:

1. Penginformasian instrument pelayanan secara terbuka, seperti bagan alir mekanisme pelayanan, daftar persyaratan, daftar tarif, jadwal waktu, nama loket petugas/meja kerja.
2. Menyediakan fasilitas media informasi, seperti papan informasi/pengumuman, kotak saran, media cetak, monitor tv, yang dapat berfungsi memberikan informasi menyangkut kegiatan pelayanan.
3. Mengadakan program penyuluhan kepada masyarakat, untuk membantu penyebaran dan pemahaman informasi kepada masyarakat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan, dan untuk era globalisasi saat ini informasi juga harus disampaikan melalui media masa *online*.

### E. Efisien

Prinsip efisien ini mengandung arti, dalam persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan yang diberikan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan agar tidak memberatkan masyarakat dan tidak terjadinya pemborosan antara lain:

1. Beban akibat pengurusan persyaratan pelayanan yang harus dipenuhi masyarakat, hendaknya tidak berakibat pengeluaran biaya yang berlebihan.
2. Dalam merumuskan mekanisme kerja mengenai kepengurusan persyaratan dan pelaksanaan pelayanan hendaknya tidak terjadi pengurusan yang mondar-mandir, sehingga hemat akan waktu, tenaga, dan materil.

#### F. Ekonomis

Prinsip ini dapat diartikan pengenaan biaya dari pelayanan harus secara wajar dan dapat dijangkau masyarakat menengah kebawah. Adapun yang perlu diperhatikan agar tidak terjadi pembiayaan tinggi antara lain:

1. Dalam penetapan tarif perlu diperhitungkan, besarnya secara layak dan terjangkau oleh masyarakat.
2. Mekanisme kerja agar dijaga sehingga tidak terjadinya pemungutan liar (pungli) sehingga tidak berdampak pembiayaan tinggi bagi masyarakat.
3. Dalam penetapan tarif pelayanan, agar tetap konsisten dan ada peraturan perundang-undangan yang melandasi peraturan tersebut.

#### G. Keadilan yang merata

Prinsip ini dapat diartikan tidak adanya pilih kasih dalam penyelenggaraan pelayanan baik dalam biaya, waktu, dan kepedulian terhadap masyarakat yang akan dilayani. Hal-hal yang hendaknya harus diperhatikan sebagai berikut:

1. Cakupan golongan masyarakat yang menerima pelayanan hendaknya meliputi semua kelas sosial merata.
2. Tidak membedakan perlakuan pemberian pelayanan.

#### H. Ketepatan waktu

Prinsip ini mengandung arti dalam pelaksanaan pelayanan hendaknya dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan atau ditentukan. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan adalah:

1. Perlu menjaga konsisten waktu pemberian pelayanan dalam penyelenggara pelayanan.
2. Mengefektifkan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian oleh pimpinan atau atasan langsung.

### 2.3.3. Pola-Pola Pelayanan

Pola atau model penyelenggaraan pelayanan adalah kesatuan bentuk tata cara penyelenggaraan pelayanan yang didasarkan pada suatu prosedur dan tata



kerja tertentu yang dilaksanakan secara sistematis dengan memperhatikan prinsip-prinsip pelayanan. Adapun pola-pola pelayanan publik menurut Istianto (Abdul Kadir, 2015:126-128):

1. Pola terpusat, pola ini di berikan secara tunggal oleh penyelenggara berdasarkan pelimpahan wewenang dari penyelenggara pelayanan terkait, contohnya: urusan perizinan bus, yang dimana perizinannya hanya dilaksanakan di Direktorat Jendral Perhubungan Darat.
2. Pola terpadu, pola ini terbagi atas dua yaitu terpadu satu atap dan terpadu satu pintu, contohnya: untuk satu atap, yaitu ada Badan Pelaksana Perizinan Terpadu (BPPT), juga pengurusan STNK dan BPKB yang di urus di satu pintu yaitu kantor Samsat sedangkan contoh dari pola satu pintu seperti kantor Camat, kantor Kelurahan/Desa/lainnya.
3. Pola gugus tugas, pola ini dilakukan satu orang/petugas atau satu gugus tugas ditempatkan pada instansi pemberi pelayanan dan lokasi pemberian pelayanan tertentu. Contohnya; gugus tugas dalam posko lebaran.

#### **2.3.4. Sistem Pelayanan Publik**

Sistem pelayanan umum sebenarnya merupakan satu kesatuan faktor yang di butuhkan dalam penyelenggaraan suatu pelayanan publik. Faktor-faktor sistem pelayanan publik ( Abdul Kadir, 2015:131-132) antara lain :

1. Sistem, prosedur dan metode, yaitu dalam pelayanan publik perlu adanya sistem informasi, prosedur, dan metode yang mendukung kelancaran dalam memberikan pelayanan.
2. Personil, dalam pelayanan publik aparatur pemerintah selaku personel pelayanan harus profesional, disiplin, dan terbuka terhadap kritikan dari pelanggan atau masyarakat.
3. Sarana dan prasarana, dalam pelayanan publik diperlukan peralatan dan ruang kerja serta fasilitas pelayanan publik.
4. Masyarakat sebagai pelanggan, dalam pelayanan publik masyarakat sebagai pelanggan sangatlah heterogen baik tingkat pendidikan maupun perilakunya.

Parasuraman (Abdul Kadir, 2015:134) mengemukakan dimensi-dimensi untuk mewujudkan kepuasan masyarakat melalui dimensi kualitas pelayanan antara lain:

1. Aspek *tangible* (nyata); kualitas pelayanan berupa tampilan fisik perkantoran.
2. Aspek *reability* (reabilitas); kemampuan untuk mewujudkan janji.

3. Aspek *responsiveness* (kemampuan reaksi); ketanggapan dalam memberikan layanan.
4. Aspek *assurance* (kepastian); kemampuan untuk memberikan jaminan.
5. Aspek *empathy* (empati); kemampuan memahami kebutuhan pelanggan.

### **2.3.5. Standar Pelayanan Publik**

Standar pelayanan publik merupakan ukuran yang dilakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi/penerima pelayanan, adapun standar pelayanan publik (Zainal Mukarom dan Muhibuddin Wijaya Laksana, 2015:85) sebagai berikut:

1. Prosedur pelayanan; dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan.
2. Waktu penyelesaian; ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan.
3. Biaya pelayanan; termasuk perincian tarif yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan.
4. Produk pelayanan; hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
5. Sarana dan prasarana; penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik.
6. Kompetensi petugas pemberi pelayanan; harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan.

### **2.3.6. Strategi Mengembangkan Pelayanan Prima Dalam Pelayanan Publik**

Terdapat strategi dalam mengembangkan pelayanan prima (Zainal Mukarom dan Muhibuddin Wijaya Laksana, 2015:153-154) yang meliputi hal-hal berikut:

1. Penyusunan Standar Pelayanan  
Suatu tolak ukur dipergunakan untuk acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji-janji dari pihak penyedia pelayanan kepada pelanggan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.
2. Penyusunan SOP  
Standar Operasional Prosedur adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator teknis, administrasi dan prosedur sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada

unit kerja yang bersangkutan. Tujuan SOP adalah menciptakan komitmen mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan unit kerja instansi pemerintah untuk mewujudkan *good governance*.

3. Pengukuran Kinerja Pelayanan

Dalam instansi pemerintah, penilaian kinerja sangat berguna untuk menilai kuantitas, kualitas, dan efisiensi pelayanan, memotivasi para birokrat pelaksana, melakukan penyesuaian anggaran, mendorong pemerintah agar lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat yang dilayani dan menuntun perbaikan dalam pelayanan publik.

4. Pengelolaan Pengaduan

Dalam rangka menyelesaikan pengaduan masyarakat, pimpinan unit organisasi penyelenggara pelayanan publik harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menyusun prioritas dalam penyelesaian pengaduan.
- b. Menentukan pejabat yang menyelesaikan pengaduan.
- c. Menetapkan prosedur penyelesaian pengaduan.
- d. Membuat rekomendasi penyelesaian pengaduan.
- e. Memantau dan mengevaluasi penyelesaian pengaduan kepada pejabat yang berwenang.
- f. Melaporkan proses dan hasil pengaduan kepada pejabat yang berwenang.

### 2.3.7. Kualitas Pelayanan Publik

Pelayanan publik pada dasarnya bertujuan untuk melayani masyarakat secara maksimal sehingga masyarakat merasa puas terhadap pelayanan yang di berikan penyelenggara pelayanan publik. Untuk mencapai kepuasan masyarakat perlu diperhatikan ciri-ciri kualitas pelayanan yang prima Sinambela,dkk, (Abdul Kadir, 2015:140 ), sebagai berikut:

1. Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
2. Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
4. Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.



5. Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan lain-lain.
6. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik.

### 2.3.8. Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat harus memperhatikan secara jelas kualitas pelayanan yang diberikan, karna kualitas pelayanan sangat berpengaruh besar terhadap kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Dalam strategi peningkatan kualitas pelayanan publik ada beberapa bidang yang harus di fokuskan untuk kualitas pelayanan (Abdul Kadir,2015:150-152) yang meliputi:

1. Fokus pada pelanggan (*customer focus*), identifikasi pelanggan (internal, eksternal, dan/atau perantara) merupakan prioritas utama. Apabila ini sudah dilakukan maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi kebutuhan, keinginan, dan harapan mereka. Kemudian perlu dirancang sistem yang bisa memberikan jasa tertentu yang memenuhi tuntutan tersebut.
2. Keterlibatan total (*total involvement*), keterlibatan total mengandung arti komitmen total. Manajemen harus memberikan peluang perbaikan kepada semua karyawan dan menunjukkan kualitas kepemimpinan yang bisa memberikan inspirasi positif bagi organisasi yang dipimpinya.
3. Pengukuran, dalam hal ini kebutuhan pokoknya adalah menyusun ukuran-ukuran dasar, baik internal maupun eksternal bagi organisasi dan pelanggan. Unsur-unsur sistem pengukuran tersebut terdiri atas: menyusun ukuran proses dan hasil, mengidentifikasi *output* dari proses-proses kerja kritis dan mengukur kesesuaiannya dengan tuntutan pelanggan, mengkoreksi penyimpangan dan meningkatkan kinerja.
4. Dukungan sistematis, manajemen bertanggung jawab dalam mengelola proses kualitas dengan cara:
  1. Membangun infrastruktur kualitas yang dikaitkan dengan struktur manajemen internal.
  2. Menghubungkan kualitas dengan sistem manajemen yang ada, seperti:
    - Perencanaan strategik.
    - Manajemen kinerja.
    - Pengakuan, penghargaan, dan promosi karyawan.

- Komunikasi.
5. Perbaikan berkesinambungan, setiap orang bertanggung jawab untuk:
    1. Memandang semua pekerjaan sebagai satu proses.
    2. Mengantisipasi perubahan kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggan.
    3. Melakukan perbaikan incremental.
    4. Mengurangi waktu siklus.
    5. Mendorong dengan senang hati dan menerima umpan balik rasa takut dan khawatir.

Melaksanakan konsep pelayanan berkualitas tersebut dapat memberikan manfaat yang sangat mendukung untuk terciptanya pelayanan yang prima, adapun manfaat tersebut antara lain:

1. Meningkatnya indeks kepuasan kualitas (*quality satisfaction index*) yang diukur dengan ukuran apapun.
2. Meningkatnya produktivitas dan efisiensi.
3. Meningkatnya moral dan semangat karyawan.
4. Meningkatnya kepuasan pelanggan.

### **2.3.9. Lemahnya Pelayanan Publik**

Lemahnya pelayanan publik menurut Moenir (dalam Zaenal Mukarom dan Mahubuddin Wijaya Laksana 2016:44-45) disebabkan oleh hal-hal berikut:

1. Tidak adanya kesadaran terhadap tugas/kewajiban yang menjadi tanggung jawab pelayanan publik sehingga mereka bekerja dan melayani seenaknya (santai), padahal orang yang menunggu hasil kerjanya sudah gelisah. Akibatnya tidak ada disiplin kerja.
2. Sistem, prosedur, dan metode kerja tidak memadai sehingga mekanisme kerja tidak berjalan sesuai dengan harapan.
3. Pengorganisasian tugas pelayan belum serasi sehingga terjadi kesimpangsiuran penanganan tugas, tumpang tindih, atau tercecernya tugas tidak ada yang menangani.
4. Pendapatan pegawai tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup meskipun secara minimal. Oleh karena itu, pegawai tersebut berusaha mencari tambahan pendapatan dalam jam kerja dengan cara “menjual” jasa pelayanan.
5. Kemampuan pegawai tidak memadai untuk tugas yang dibebankan kepadanya. Akibatnya, hasil pekerjaan tidak memenuhi standart yang telah ditetapkan.

6. Tidak tersedianya sarana pelayanan yang memadai. Akibatnya pekerjaan menjadi lamban, waktu banyak yang hilang, dan penyelesaian masalahnya terlambat.

Menurut Moenir (dalam Zaenal Mukarom dan Mahubuddin Wijaya

Laksana 2016:45), agar pelayanan publik berjalan lancar dengan baik, diperlukan beberapa faktor pendukung, yaitu:

- a. Kesadaran.
- b. Aturan .
- c. Organisasi.
- d. Pendapatan.
- e. Kemampuan-keterampilan.
- f. Sarana pelayanan.

Dengan demikian, pada hakikatnya lemahnya pelayanan publik bermuara pada dua faktor utama, yaitu faktor manusia sebagai faktor utama dan sistem karena untuk perbaikannya diperlukan perbaikan terhadap kedua unsur tersebut.

### **2.3.10. Perbedaan Karakteristik Antara Penyediaan Pelayanan Publik oleh Pemerintah dan Swasta**

Ada beberapa perbedaan yang mendasar dalam memberikan pelayanan publik yang dilakukan pemerintah dan swasta (Deddy Mulyadi 2016:182-183), sebagai yang dijelaskan dibawah ini

#### **A. Pemerintah**

Adapun yang menjadi karakteristik penyediaan pelayanan publik oleh pemerintah antara lain:

- a. Memiliki dasar hukum yang jelas dalam penyelenggaraannya.
- b. Memiliki kelompok kepentingan yang luas.
- c. Memiliki tujuan yang sosial.
- d. Dituntut akuntabel kepada publik.
- e. Indikator kinerjanya harus lugas.
- f. Seringkali menjadi isu sasaran publik.
- g. Masalah yang dihadapi bersifat kompleks.
- h. Sulit mengukur atau menentukan keluaran/kualitas pelayanan yang diberikan.
- i. Tidak mengenal bangkrut seburuk apapun pelayanannya.

- j. Lemah dalam memecahkan masalah yang bersifat internal (sulit mencegah kepentingan stakeholder internal).
- k. Sebagian besar bersifat monopoli dengan berbagai kelemahan yang dapat terjadi.

#### B. Swasta

- a. Didasarkan pada kebijakan direksi/pimpinan perusahaan.
- b. Terfokus pada pemegang saham.
- c. Memiliki tujuan mencari keuntungan.
- d. Akuntabel pada kalangan terbatas.
- e. Kinerjanya ditentukan atas dasar kinerja manajemen/kinerja finansial.
- f. Tidak terlalu terkait dengan isu politik.
- g. Tidak terlalu bersifat kompleks.
- h. Relatif lebih murah.
- i. Mengenal dan riskan dengan *bottom line* pelayanan yang buruk langsung berakibat fatal terhadap perusahaan.
- j. Sangat terpengaruh masalah eksternal/lingkungan strategis yang dihadapi.
- k. Semangat kompetisi yang tinggi.

Ada lima karakteristik yang membedakan jenis pelayanan publik dengan pelayanan yang lainnya (Deddy Mulyadi 2016:183) :

1. Adaptif  
Derajat perubahan layanan sesuai dengan tuntutan perubahan yang diminta oleh pengguna.
2. Posisi tawar pengguna/konsumen  
Semakin tinggi posisi tawar pengguna maka akan semakin tinggi pula peluang untuk permintaan pelayanan yang lebih.
3. Tipe pasar  
Menggambarkan jumlah penyelenggara pelayanan yang ada dan hubungannya dengan pengguna lain.
4. Lokus kontrol  
Menjelaskan siapa yang memegang kontrol atas transaksi, apakah pengguna atau penyelenggara pelayanan.
5. Sifat pelayanan  
Menunjukkan kepentingan pengguna atau penyelenggara pelayanan yang lebih dominan.

#### 2.4. Kerangka Pemikiran

Dalam rangka kegiatan penelitian seorang peneliti harus menguasai teori sebagai dasar argumentasi dalam menyusun kerangka pemikiran yang membutuhkan hipotesis. Kerangka pemikiran ini merupakan penjelasan terhadap

gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan. Menurut Uma Sekaran (dalam Sugiyono 2014:60), kerangka pemikiran adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Apabila penelitian hanya membahas sebuah variabel atau lebih secara mandiri, maka yang dilakukan peneliti disamping mengemukakan deskripsi teoritis untuk masing-masing variabel, juga argumensi terhadap variasi besaran variabel yang diteliti menurut Sapto Haryoko (dalam Sugiyono 2014:60).

Dengan pemekaran Nagari/Desa tersebut bisa dimanfaatkan pemerintah untuk memaksimalkan pelayanan publik dan mensejahterakan masyarakat ditambah dengan kebebasan yang dimiliki pemerintah daerah memungkinkan untuk membuat inisiatif sendiri dalam mengelola dan mengoptimalkan sumberdaya daerah sesuai dengan yang dibutuhkan daerah tersebut.

Kebebasan yang terbatas atau kemandirian daerah dengan adanya otonomi daerah adalah wujud pemberian kebebasan yang harus dipertanggungjawabkan dengan demikian hak dan kewajiban serta kebasan daerah untuk menyelenggarakan urusan-urusannya sepanjang sanggup untuk melakukannya dan penekanannya lebih bersifat otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Disamping itu, reformasi birokrasi dan pelayanan perlu dilakukan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pemekaran merupakan langkah strategis untuk membangun infrastruktur, kejelasan wilayah administrasi dan pelayanan yang maksimal.

Dengan pemekaran yang dimana sebelumnya tidak stabilnya pelayanan terhadap masyarakat di karenakan tidak sepadannya antara aparatur yang melayani dengan penduduk yang akan dilayani, maka dari itu pemerakan dipercaya adalah salah satu solusi yang dapat menangani masalah pelayanan yang tidak maksimal.





## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian**

##### **3.1.1. Jenis**

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, yang dimana kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (Sugiyono 2014:9). Metode kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah, yang memandang rialitas sosial sebagai sesuatu yang utuh, kompleks, dinamis, penuh makna (Sugiyono 2014:8). Jenis penelitian kualitatif juga disebut penelitian yang hanya menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi atau berbagai keadaan yang didapatkan pada waktu penelitian dilakukan.

##### **3.1.2. Sifat**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sifat deskriptif, yang dimana deskriptif akan mendiskripsikan penelitian ini secara menyeluruh dengan menganalisis fenomena, peristiwa, sikap, pemikiran dari orang secara individu maupun kelompok. Peneliti mendeskripsikan bagaimana dampak pemekaran nagari dalam meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, dengan maksud memahami realita yang ada.

#### **3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi yang akan digunakan adalah kantor Nagari Ujung Gading, sedangkan waktu yang akan digunakan untuk meneliti adalah Desember 2017-Januari 2018.

### **3.3 Informan Penelitian**

Untuk memperlancar penelitian dan mendapatkan informasi yang jelas dan akurat maka peneliti menetapkan informan, informan yang peneliti gunakan adalah

1. Informan kunci : Wali Nagari Ujung Gading
2. Informan utama : Kaur Pemerintahan Nagari Ujung Gading
3. Informan tambahan : Masyarakat Nagari Ujung Gading

### **3.4. Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Gulo (2002:110) pengumpulan data merupakan aktivitas yang dilakukan guna mendapatkan informasi yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan dari suatu penelitian. Adapun secara garis besar tujuan penelitian ini adalah menemukan jawaban dari rumusan masalah yang peneliti tetapkan sebelumnya, untuk mendapatkan jawaban tersebut maka peneliti memerlukan data atau informasi yang diperoleh melalui tahap pengumpulan data. Dalam penelitian ini untuk pengumpulan data yang diperlukan sehingga mendapatkan informasi atau data yang akurat atau jelas, maka penulis menggunakan beberapa cara teknik pengumpulan data, yaitu:

#### **3.4.1. Penelitian kepustakaan**



Penelitian kepustakaan ini merupakan penelitian dengan cara mempelajari dan mengumpulkan keterangan dari buku-buku, media masa, jurnal, dan karya ilmiah. Hal tersebut dilakukan dengan maksud untuk memperluas dan memperdalam cakrawala pemikiran dan untuk menentukan teori-teori yang mendukung penelitian lapangan ini.

### **3.4.2. Penelitian Lapangan**

Penelitian lapangan merupakan penelitian dengan cara terjun langsung kelapangan yaitu Kantor Nagari Ujung Gading, untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan judul penelitian. Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan beberapa cara, antara lain :

#### **1. Observasi**

Sebagai teknik pengumpulan data, observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur yang tampak dalam suatu gejala pada objek penelitian. Unsur yang tampak itu dinamakan dengan data atau informasi yang harus diamati dan dicatat secara benar dan lengkap. Teknik ini dipakai untuk mengamati secara langsung keadaan dilapangan agar peneliti mendapatkan gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti.

#### **2. Wawancara**

Merupakan suatu proses tanya jawab atau dialog secara lisan antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti, dimana pewawancara bisa menyampaikan pertanyaan dengan jelas dan mendalam untuk menjawab semua

pertanyaan dan mencatat semua informasi yang diperlukan dengan baik dan benar.

### 3. Dokumentasi

Teknik ini merupakan suatu cara pengumpulan, pengolahan, serta penyimpanan data dan informasi yang dilakukan dengan menganalisis isi dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti supaya dapat digunakan sebagai asas bagi sesuatu kejadian dan penghasilan sesuatu terbitan serta aturan suatu lembaga masyarakat.

#### **3.5. Teknik Analisis Data**

Suatu penelitian sangat dibutuhkan analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang akan diteliti. Teknik analisis data yang akan peneliti gunakan adalah teknik analisis data model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2014:246). Yang dimana terdiri dari :

1. Reduksi data, yaitu data yang diperoleh dilokasi penelitian (data lapangan) dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan dari lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya.
2. Penyajian data, yaitu memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari peneliti. Data yang disajikan adalah ringkasan data primer (hasil wawancara), dan data sekunder (dokumen-dokumen) dalam bentuk tabel gambar maupun deskripsi

3. *Conclusion/verification*, yaitu sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisa data yang dikumpulkan dan menarik kesimpulan dari penelitian.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Jamaluddin (2015), *Metode Penelitian Administrasi Publik Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Gava Media
- Chalid, Pheni (2005), *Otonomi Daerah Masalah, Pemberdayaan, dan Konflik*, Jakarta: Kemitraan
- Gulo,W (2002), *Metode Penelitian*, Jakarta : Grasindo.
- Kadir, Abdul (2015), *Studi Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik*, Dharmasraya : CV. Dharma Persada.
- Kurniawan, Agung (2005), *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta: pembaharuan.
- Mukarom Zaenal dan Laksana Wijaya Muhibuddin (2015), *Manajemen Pelayanan Publik*, Bandung: CV. Pustaka Setia
- Mukarom Zaenal dan Laksana Wijaya Muhibuddin (2016), *Membangun Kinerja Pelayanan Publik*, Bandung: CV. Pustaka Setia
- Mulyadi Dedy (2016), *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Bandung: Alfabeta
- Saefulhakim (2004), *Pemekaran Daerah*, Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiyono( 2014), *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sumantri, Jujun, Surya ( 2002), *Filsafat Ilmu*, Jakarta: Sinar Harapan
- Supriyanto, Eko (2001), *Operasionalisasi Pelayanan Prima*, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta
- Surahkmad, Winarno (2000), *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung : Tarsito
- Sumber Lain
- <http://Masoedabidin.com/> pandangan-mengenai-uu-tentang-desa-dan-kaitannya-dengan-nagari.html. (diakses pada 10 Oktober 2017).
- <http://risehtunong.blogspot.co.id> >2016/09 >pemekaran-des-dan-prosedur-usulan-pemekaran.html. (diakses pada 03 Oktober 2017)
- <http://www.gurupendidikan.com./pengertian-nagari.html>. (diakses pada 20 Oktober 2017)

<http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-pemekaran.html>. (diakses pada 20 Oktober 2017)

<http://www.slideshare.net>abieyanka.html>. (diakses pada 15 Oktober 2017)

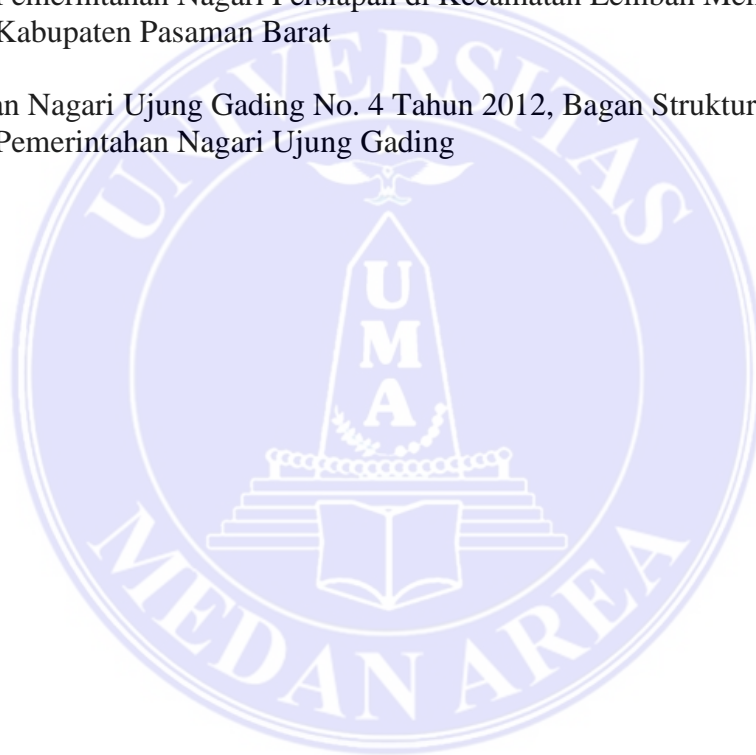
Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007, Tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.

Peraturan Pemerintah (PP) No 72 tahun 2005, Tentang Desa

Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 39 tahun 2017, Tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Persiapan di Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat

Peraturan Nagari Ujung Gading No. 4 Tahun 2012, Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Nagari Ujung Gading



## **LAMPIRAN 1**

### **PEDOMAN WAWANCARA APARAT PEMERINTAHAN NAGARI UJUNG GADING**

1. Apa yang menjadi latar belakang terjadinya pemekaran?
2. Bagaimana prosedur atau tata cara dalam kepengurusan layanan di kantor Nagari Ujung Gading?
3. Bagaimana masyarakat mengetahui syarat-syarat dalam pengurusan layanan?
4. Apakah sebelum adanya pemekaran, informasi sudah dengan mudah didapatkan oleh semua kalangan masyarakat?
5. Apakah sesudah dan sebelum pemekaran masyarakat dengan gratis mendapatkan segala jenis layanan di kantor Nagari Ujung Gading?
6. Apakah ada batas waktu yang ditetapkan dalam penyelesaian jasa layanan?
7. Apakah hasil jasa layanan di kantor Nagari Ujung Gading ini dapat dipertanggung jawabkan, dan apakah sudah pernah masyarakat mengomentari hasil jasa layanannya?
8. Menurut bapak, sebelum adanya pemekaran apakah pelayanan terutama pelayanan administrasi sudah memenuhi keinginan dan harapan masyarakat?
9. Sebelum pemekaran sampai sekarang apakah pernah masyarakat mempermasalahkan karena masalah pilih kasih dalam melayani?
10. Bagaimana yang diharapkan Nagari setelah adanya pemekaran dalam mencapai pelayanan yang prima?



## **MASYARAKAT NAGARI UJUNG GADING**

1. Apakah bapak/ibu merasa kesulitan dalam memenuhi persyaratan yang dibutuhkan untuk pengurusan jasa layanan?
2. Bagaimana bapak/ibu, mengetahui syarat-syarat yang diperlukan untuk pengurusan jasa layanan?
3. Bagaimana bapak/ibu mengetahui informasi yang ada di Nagari Ujung Gading?
4. Apakah bapak/ibu pernah dimintai uang selama bapak/ibu melaksanakan pengurusan jasa layanan di kantor Nagari Ujung Gading ini?
5. Apakah dalam pengurusan layanan bapak/ibu pernah merasa terlalu lama dalam penyelesaian jasa layanan?
6. Apakah bapak/ibu pernah melihat atau merasakan indikasi pilih kasih yang dilakukan aparat pemerintahan Nagari Ujung Gading?
7. Apakah sejauh ini menurut bapak/ibu, dalam pengurusan ke kantor Nagari Ujung Gading ini sudah merasa puas?

## LAMPIRAN 2

### DATA-DATA NARASUMBER

1. Nama : Padri, S.Pd  
Jabatan : Sekretaris Nagari Ujung Gading  
Waktu Penelitian : 10 Januari 2018  
Tempat Penelitian : Kantor Nagari Ujung Gading
2. Nama : Yunaldi  
Jabatan : Kepala Urusan Pemerintahan  
Waktu Penelitian : 10 Januari 2018  
Tempat Penelitian : Kantor Nagari Ujung Gading
3. Nama : Sri Haryani  
Jabatan : Masyarakat Nagari Ujung Gading  
Waktu Penelitian : 10 Januari 2018  
Tempat Penelitian : Kantor Nagari Ujung Gading
4. Nama : Afrijan  
Jabatan : Masyarakat Nagari Ujung Gading  
Waktu Penelitian : 10 Januari 2018  
Tempat Penelitian : Kantor Nagari Ujung Gading
5. Nama : Efrida Putri  
Jabatan : Masyarakat Nagari Ujung Gading  
Waktu Penelitian : 10 Januari 2018  
Tempat Penelitian : Kantor Nagari Ujung Gading

### LAMPIRAN 3

### DOKUMENTASI FOTO PENELITIAN

**Gambar 1**



Gambar 1: wawancara dengan Sekretaris Nagari Ujung Gading

**Gambar 2**



Gambar 2: Wawancara dengan Kepala Urusan Pemerintahan Nagari Ujung Gading



**Gambar 3**



**Gambar 3: Wawancara Dengan Masyarakat Nagari Ujung Gading**

**Gambar 4**



**Gambar 4: Wawancara Dengan Masyarakat Nagari Ujung Gading**

Gambar 5

**APB NAGARI UJUNG GADING TAHUN ANGGARAN 2017**

**1. PENDAPATAN** **RP2.342.623.791,-**

- PENDAPATAN ASLI NAGARI RP 50.000.000,-
- DAK Istimewa RP 3.381.888,-
- DAK Desa RP 1.775.074.518,-
- ALOKASI DAN BANTUAN RP 2.375.441.212,-
- BANTUAN KEWILAYAHAN PROVINSI RP 15.000.000,-

**2. BELANJA** **RP7.647.368.313,-**

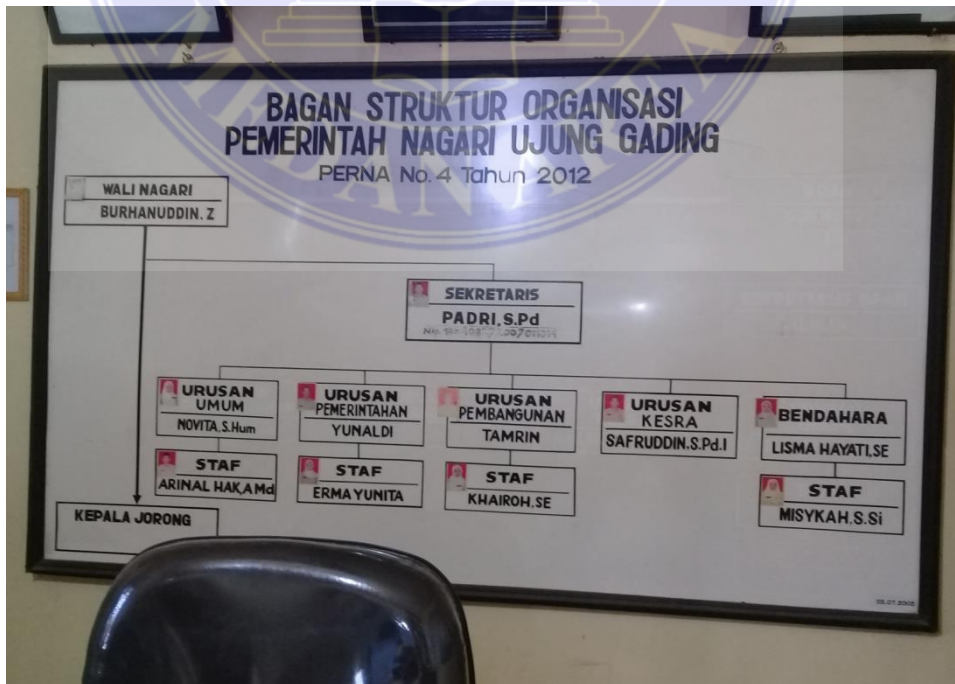
- BIDANG PERVELOSISIRAN PEMERINTAHAN NAGARI**
  - PEMBAYARAN PENGHABISAN TENAGA DAN TUNJANGAN RP 959.150.000,-
  - KEGIATAN OPERASIONAL KANTOR NAGARI RP 600.842.883,-
  - KEGIATAN OPERASIONAL BAKUS RP 77.830.000,-
  - KEGIATAN OPERASIONAL KEPALA JORONG RP 6.208.000,-
  - KEGIATAN PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH RP 21.450.000,-
  - KEGIATAN PERENCANAAN PERMANGAN NAGARI RP 128.289.000,-
  - KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI NAGARI RP 6.000.000,-
  - KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEJANGAM RP 2.887.000,-
  - KEGIATAN PENATAAN NAGARI RP 1.602.360.000,-
  - KEGIATAN OPERASIONAL DAN INSIDENTIAS RP 155.007.650,-
- BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NAGARI**
  - KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN NAGARI RP 1.101.305.886,-
  - KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN RP 148.000.000,-
  - KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN RP 50.000.000,-
  - KEGIATAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA TAMAN BACAAN MASYARAKAT RP 129.000.000,-
  - KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH RP 76.200.000,-
  - KEGIATAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN (MOBIL AMBULANCE) RP 284.752.000,-
  - KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA OBJEK WISATA RP 42.000.000,-
  - KEGIATAN STIMULAN NAGARI RP 367.750.000,-
- BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**
  - KEGIATAN PEMBINAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN RP 98.000.000,-
  - KEGIATAN PEMBINAAN PEMUDA DAN OLIMPIADA RP 16.140.000,-
  - KEGIATAN ORGANISASI PEREMPUAN/PPK RP 50.000.000,-
  - KEGIATAN PEMBINAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA RP 307.080.000,-
  - KEGIATAN PEMBINAAN LEMBAGA ADAT (KAN & BUNDO KANDUANG) RP 105.000.000,-
  - KEGIATAN PEMBINAAN LPMN RP 20.000.000,-
  - KEGIATAN PEMBINAAN PERTANIAN RP 102.000.000,-
  - KEGIATAN PEMBINAAN KESEHATAN RP 40.650.000,-
  - KEGIATAN PEMBINAAN PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL RP 20.000.000,-
- BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**
  - KEGIATAN PELATIHAN KEPALA DESA/DIN PERANGKAT RP 148.580.150,-
  - KEGIATAN PEMBERDAYAAN KEPYANDUAN LEPK DAN BPPK RP 485.046.404,-
  - KEGIATAN PEMBERDAYAAN USABA RECI DAN KUSTUSI REUMATI TERANGGA MASYARAKAT RP 203.377.385,-
  - KEGIATAN SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT RP 60.391.045,-
  - KEGIATAN PENGEMBANGAN SENI BUDAYA DAN PELATIHAN BUMNAG RP 30.000.000,-
  - KEGIATAN SELEKSI DAN PELATIHAN KURANG MAMPU/ DIFFABEL/ ANAK PUTUS SEKOLAH LAINNYA RP 21.060.000,-
  - KEGIATAN PELATIHAN KELOMPOK SANDAR WISATA RP 148.000.000,-
  - KEGIATAN PELATIHAN KELOMPOK SANDAR WISATA RP 21.010.100,-
- BIDANG TIDAK TERDUGA** **RP 20.000.000,-**
- PEMBAYARAN**
  - PENERIMAAN PEMBIAYAAN (SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA) RP 381.736.812,-
  - PENGELUARAN PEMBIAYAAN (PENYERTAAN MODAL BUMNAG) RP 50.000.000,-

**PENGUNAAN DANA KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2017**

- RABAT BETON JR. TL AMBUN RP 110.000.000 ADDIADN
- RABAT BETON JR. TAMPU RP 110.000.000 ADDIADN
- RABAT BETON JR. SITIAK RP 110.000.000 ADDIADN
- RABAT BETON JR. KOTO PINANG RP 110.000.000 ADDIADN
- LANJUTAN PEMBUKAAN JALAN DAN JEMBATAN JR. KOTO SAWAH RP 48.000.000 ADDIADN
- PEMBUKAAN JALAN JORONG BRASTAGI RP 110.000.000 ADDIADN
- PEMBANGUNAN SARANA CARE PRASARANA NAGARI WISATA JR. SITIAK RP 42.000.000 ADDIADN
- PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH DSN ULU BUNDA JORONG BRASTAGI RP 21.500.000 ADDIADN
- PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH DSN TAREH JORONG KOTO SAWAH RP 30.000.000 ADDIADN
- PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH DSN GGG SORIK JORONG KOTO SAWAH RP 18.700.000 ADDIADN
- BANTUAN STIMULAN WALI NAGARI RP 42.750.000 ADDIADN
- PEMBUKAAN JALAN AMPERA BT GUNUNG JR. KOTO SAWAH RP 123.000.000 DDS
- LANJUTAN PEMBUKAAN JALAN TEMPAT JR. SITIAK RP 100.000.000 DDS
- PEMBANGUNAN SAMPAH SEMENTARA RP 173.305.886 DDS
- PEMBANGUNAN GEDUNG PUSTAKA NAGARI RP 123.000.000 DDS
- PEMBANGUNAN GEDUNG POLINDES JR. LE ALA RP 148.000.000 DDS
- PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PAJDI NAGARI RP 50.000.000 DDS
- PENGADAAN AMBULANCE NAGARI RP 284.752.000 DDS
- PEMBANGUNAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI RP 150.000.000 DDS
- PEMBANGUNAN LISTRIK RP 15.000.000 DDS
- PEMBANGUNAN JAMBAAN RP 100.000.000 DDS

Gambar 5: Pemberitahuan Penggunaan Anggaran Nagari Tahun 2017

Gambar 6



Gambar 6: Bagan Struktur Pemerintahan Nagari Ujung Gading